

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Siti Ramayoni

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Email: sitiramayoni@gmail.com

Abstract

The purpose of this research: (1) the effect of understanding governmental accounting standards on the quality of local government financial statement of kuantan singingi regency; (2) the effect of utilization of local financial information system on the quality of local government financial statement of kuantan singingi regency; (3) the effect of human resource capacity on the quality of local government financial statement of kuantan singingi regency. This research is descriptive by using quantitative data analysis with causal research design. The data used in this study is the primary data in the form of questionnaires distributed throughout the organization of regional divides kuantan singingi regency. The numbers of population this research was 161 people and the sample size was 78 people. In this research using 3 independent variables namely understanding governmental accounting standards (x_1), utilization of local financial information system (x_2), human resource capacity (x_3), and quality of financial statement (y) as it dependent variable. The result of this study indicate that the understanding governmental accounting standards has positive and significant impact on the quality of local government financial statement of kuantan singingi regency of 18,4%. utilization of local financial information system has a positive and significant impact on the quality of local government financial statement of kuantan singingi regency of 49,5%. And so also with human resource capacity influential positive and significant to quality of local government financial statement of regency of kuantan singingi equal to 29,9%.

Keyword: understanding governmental accounting standards, utilization of local financial information system, human resource capacity and quality of local government financial statement.

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai organisasi yang tidak berorientasi mendapatkan laba atau keuntungan, biasanya kegiatan lebih banyak berhubungan dengan aktivitas sosial dan pelayanan masyarakat, diantaranya adalah instansi pemerintah, yayasan, partai politik, sekolah, rumah sakit, universitas dan organisasi ksejenisnnya. Dalam waktu yang relative singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan akui. Tuntutan akuntabiklitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009:15).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diharapkan dengan upaya yang konkrit untuk mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahuns 2010 tentang Standar Akuntansi Pemekrintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah berperan aktif untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kualitas merupakan sesuatu yang sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Meskipun Kabupaten Kuantan Singingi telah meraih 7 kali opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan, namun masih ada kelemahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dan standar akuntansi pemerintah dari penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, belum efektifnya pemanfaatan terhadap sistem informasi akuntansi keuangan, dan masih lemahnya pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian Artana (2016) terdapat dua faktor yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dan simultan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan sistem informasi akuntansi keuangan.

Yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintah berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Penerapan standar akuntansi pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang menjamin laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi keuangan yang berguna bagi para penggunaannya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan. Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah sebagai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif jika pegawai/staf dalam lembaga-lembaga pemerintah dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi pegawai/staf untuk mengerti dan kegunaan sistem tersebut.

Ada satu faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas juga harus dilihat sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai kinerja yang baik, sehingga akan dapat menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) yang baik pula.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih belum berkualitas terbukti dengan masih terdapat penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan yang ditemui. Oleh karena itu topik tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah,

pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia penting untuk diteliti mengingat kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Wulandari dan Muhammad, 2014: 227). Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. *Huang et al.*, (1999) dalam Sukmaningrum (2012: 3)

menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu orang yang bertugas untuk menyajikan laporan keuangan suatu instansi haruslah paham tentang aturan ataupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dibuat berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Ihsanti (2014) bahwa laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap SAP berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dari beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis sementara bahwa:

H1: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi..

2.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Pemerintah daerah sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan transparansi sehingga dapat digunakan untuk pengendalian keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah.

Menurut Silviana (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 menyatakan bahwa SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahan untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang andal. Pemakaian sistem informasi akuntansi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan sistem informasi akuntansi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah data yang bervolume besar. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi adalah kecepatan pemrosesan informasi.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Menurut Evicahyani (2016) menyatakan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan

kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan publik yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dari beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis sementara bahwa:

H2: Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3 Kapaitas Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (2012), sumber daya manusia adalah manusia mempunyai kemampuan untuk mengelola organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga sumber daya manusia menjadi faktor utama sekaligus penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi.

Menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas juga harus dilihat sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai kinerja yang baik, sehingga akan dapat menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) yang baik pula.

Dalam menjalankannya fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan, tetapi kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi merancang serta menganalisis sistem akuntansi yang ada. Menurut Magfiroh (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat bernilai dalam sebuah organisasi dalam hal ini pemerintahan, pegawai/staf yang melaksanakan dan berperan dalam proses akuntansi.

Menurut Aini (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia tersebut memang harus mempunyai kapasitas sehingga bisa menguasai pengetahuan dan kemahiran mengenai akuntansi karena sebagai pondasi dalam penyusunan dan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas baik. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin supaya mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting. Karena kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan seperti pegawai/staf bagian keuangan/akuntansi dalam melaksanakan tugas berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab terhadap kewajiban. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait

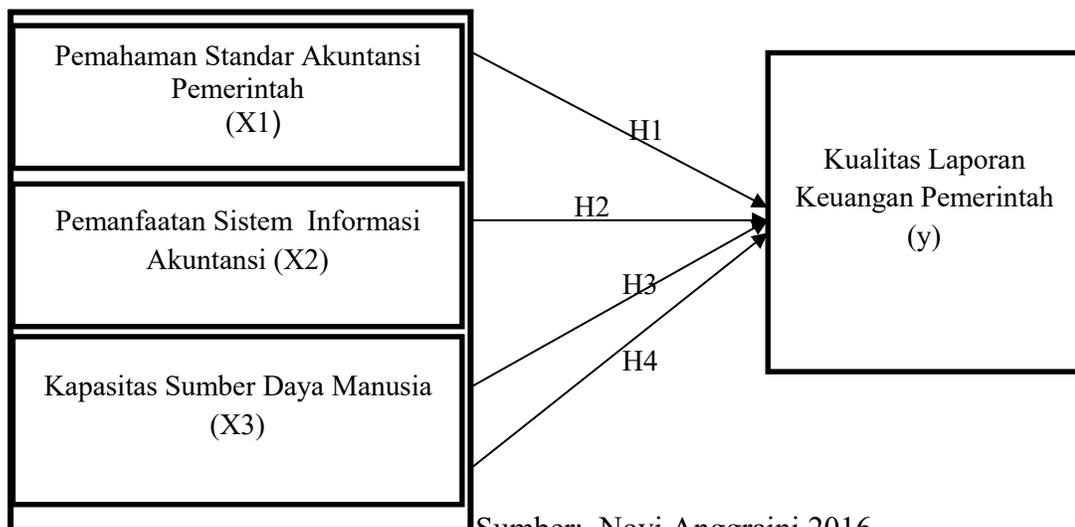
dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi, informasi yang disajikan itu bergantung pada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai/staf.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017), Sapitri (2015), Yudianta (2012), yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis sementara bahwa:

H3 = Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Novi Anggraini 2016

3. Metode Penelitian

3.1 rancangan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut (Emzir,2010:119). Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel bebas/independn (variabel yang mempengaruhi) dan variabel yang dipengaruhi) adalah variabel terikat/dependen (Sugiono, 2014:93). Dalam penelitian ini akan menggambarkan penagruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan kapasitas sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian hipotesis-hipotesis dan teori melalui pengukuran variabel-vaibel penelitian dalam angka (efferin, 2008:47).

3.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi di lingkungan organisai perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Kompleks Perantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian adalah dari Bulan Februari tahun 2019 sampai dengan Bulan Juli 2019.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh pegawai bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang semuanya berjumlah 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 161 orang.

penelitian ini metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode pemilihan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) tepatnya Pemilihan sampel bertujuan (*Purposive Sampling*). sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang berada pada Bagian Keuangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana ketiga sampel tersebut yaitu: pihak yang terlibat dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan daerah, serta pihak yang secara langsung menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah. Adapun jumlah sampel yang akan di teliti adalah berjumlah 78 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survai kuesioner yang diberikan kepada responden yang ada pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Variabel Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mencari hubungan/pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya maka, variabel didefinisikan secara operasional. Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel terikat (*dependent variable*), dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel dependen pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan yang menjadi variabel independen adalah Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa kuisoner/angket (daftar pertanyaan) guna mengumpulkan data dari responden. Untuk mengukur setiap variabel yang diteiti dalam penelitian ini digunakan indikator atau item yang menggambarkan variabel yang diukur. Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert dipergunakan jika peneliti ingin mendapatkan data mengenai bobot dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden (Efferin, 2008;109).

Skala likert yang digunakan adalah skala likert 5 poin, yakni memiliki alternatif/ tingkatan jawaban sebagai berikut (Efferin, 2008:109):

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = point 1
2. Tidak Setuju (TS) = point 2
3. Kurang Setuju (KS) = point 3
4. Setuju (S) = point 4
5. Sangat Setuju (SS) = point 5

3.7 Pengujian data dan Metode Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reabilitas

Ghozali (2013:52-53) mendefinisikan uji validitas sebagai alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor konstruk. Uji reabilitas dilakukan setelah uji validitas dan hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41).

2. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode regresi berganda merupakan metode statistik untuk menguji pengaruh pada dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian dan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1 : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X3 : Kapasitas Sumber Daya Manusia

α : Konstanta

$\beta(1,2,3)$: Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

ε : Error

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013:160-165). Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

4. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independe. Uji *multikolinieritas* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:105).

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan *Uji Glejser*. *Uji Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* dari *unstandardized residual* sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas $> 0,05$.

6. Uji Autokorelasi

Aoutokorelasi dikenal dengan nilai *Durbin Watson* (D–W) artinya terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013:110).

7. Uji Koefisian Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < 0,05$ maka H_a diterima (ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig > 0,05$ maka H_a ditolak (tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat).

8. Uji Koefisian Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakan semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

9. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R^2 semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen rendah. Apabila nilai R^2 mendekati satu, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Umum Responden

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah pegawai yang bekerja pada OPD Kabupaten Kuansing dengan kriteria kasubag keuangan, bendahara dan staff yang bekerja dibagian keuangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, di mana penyebarannya dilakukan secara langsung (*personally administred questonnairies*). *Personally administred questionnaires* yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mendatangi secara langsung tiap-tiap OPD.

Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 78 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 78kuesioner (100%). Tingginya tingkat pengembalian kuisoner dikarenakan kuisoner disebar secara langsung. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 4.2
Sampel dan Tingkat Pengembalian KuesioneR

No	Keterangan	Total	Persentase %
1	Kuisioner yang dikirim	78	100%
2	Kuisioner kembali	78	100%
3	Kuisioner yang dapat diolah	78	100%
4	Kuisioner yang tidak dapat diolah	0	0

Sumber : Data Primer Olahan, 2019

2. Uji Validitas dan Reabilitas

Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuisoner. Dimana keseluruhan variable penelitian terdiri 45 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom ($df = n-2$) dengan $\alpha 0,05$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria validitas jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n - 2 = 78 - 2 = 76$ dan $r_{tabel} = 0.188$

Uji Reabilitas

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing- masing instrument. Pengujian dilakukan dengan SPSS versi 25 menggunakan teknik *cronbach alpha* dengan kriteria jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ maka dinyatakan reliabel sedangkan jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka dinyatakan reliabel (Sujarweni, 2014:192). Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil pengujian tersebut adalah :

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pemahaman standar	0,962	10

akuntansi pemerintah (X ₁)		
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X ₂)	0,694	10
kapasitas sumber daya manusia (X ₃)	0,908	9
Kualitas laporan keuangan daerah (y)	0,839	16

Sumber : Data Primer Olahan, 2019

3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). *Statistical Package For Sosial Science* (SPSS) versi 25 akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linear berganda.

Dari pengolahan data komputer program SPSS versi 25, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,631	7,301		3,921	,000
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X ₁)	,184	,066	,283	2,805	,006
	Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X ₂)	,495	,154	,309	3,217	,002
	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X ₃)	,299	,116	,264	2,584	,012

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Data Primer Olahan, 2019.

$$Y = 28,631 + 0,184 X_1 + 0,495 X_2 + 0,299 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ : Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X₂ : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

X₃ : Kapasitas Sumber Daya Manusia

α : Konstanta

$\beta(1,2,3)$: Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

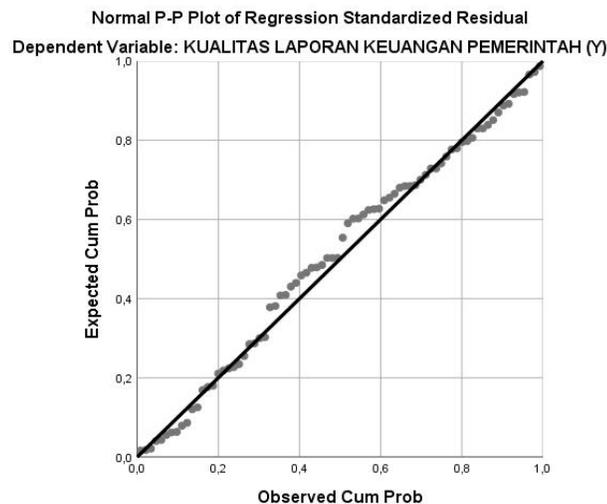
ε : Error

4. Uji Normalitas

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah Grafik Normal P-P Plot dengan bantuan SPSS versi 25. Menurut Jakaria (2015:158), pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 4.1
Grafik Normal Probability Standardized Residual



Sumber : Data Primer Olahan, 2019

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal (tidak terpencah dari garis diagonal) dan mengikuti arah garis diagonalnya maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk uji normalitas terpenuhi.

5. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independe. Uji *multikolinieritas* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka

terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:105). Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas

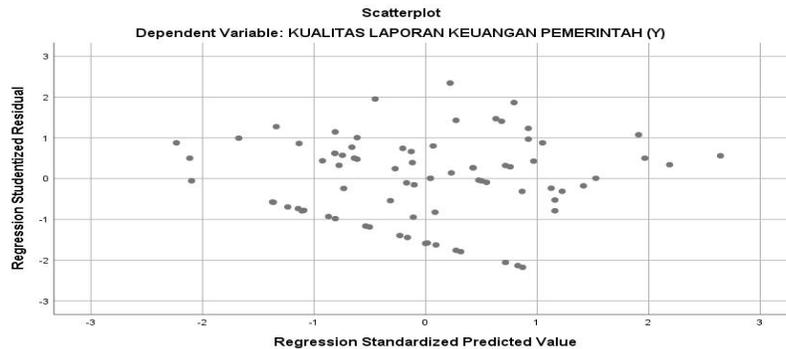
Variabel	Toleranc e	VIF	Kesimpulan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)	0,576	1,735	Tidak Terjadi <i>Multikolinieritas</i>
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X_2)	0,634	1,578	Tidak Terjadi <i>Multikolinieritas</i>
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_3)	0,807	1,239	Tidak Terjadi <i>Multikolinieritas</i>

Sumber : Data Primer Olahan, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF <10 untuk semua varabel bebas (independen), dan nilai *tolerance* juga <0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonelias antara variabel bebas (independen) dalam model regresi ini.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan *Uji Glejser*. *Uji Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* dari *unstandardized residual* sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,06. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti gambar berikut :



Gambar 4.2 *scatter plot*

Dari gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik pernyataan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak memperlihatkan pola tertentu pada *scatterplot*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* sehingga model regresi dalam penelitian ini sudah baik, sehingga model regresi layak untuk memprediksi dependen berdasarkan masukan variabel independen yang digunakan.

7. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dikenal dengan nilai *Durbin Watson* (D–W) artinya terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013:110). Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat ditunjukkan seperti tabel berikut :

Table 4.15
Statistik Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,582 ^a	,339	,312	3,838	1,015

a. Predictors: (Constant), KSDM (X3), PSIA (X2), PSAP (X1)

b. Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Y)

Sumber : Data Primer Olahan, 2019.

Dari tabel 4.17 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,015 yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2. Hal ini membuktikan bahwa model regresi memenuhi syarat bebas *autokorelasi* atau tidak terdapat *autokorelasi*.

8. Pengujian Hipotesis pertama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemahaman standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah adalah 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,805 > 1,993$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya dengan tingkat pengaruh yaitu sebesar 0,184 atau 18,4%. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memadai pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah bagi pembuat laporan keuangan. dalam penelitian ini dikatakan bahwa setiap pegawai pembuat laporan keuangan harus memahamai standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pembuat laporan keuangan tersebut.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang pertama mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafid (2016) yang membuktikan secara empiris bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Hal yang sama juga dibuktikan Artana (2016) mengatakan bahwasanya hasil dari penelitiannya yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi.

10. Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah adalah 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,217 > 1,993$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya dengan tingkat pengaruh yaitu sebesar sebesar 0,495 atau 49,5%. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi informasi yang dihasilkan.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang kedua mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2010) membuktikan secara empiris bahwa pemafaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian Rafid (2016) yang mengatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone.

11. Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kapasitas sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dikatakan signifikan karena berdasarkan hasil uji regresi secara parsial nilai sig. variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah adalah 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,584 > 1,993$. Artinya, apabila sig. lebih kecil dari 0,05 serta nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya dengan tingkat pengaruh yaitu sebesar 0,299 atau 29,9%. Dari hasil pengujian tersebut maka menghasilkan keputusan berupa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingginya pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan system informasi akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia maka akan berimplikasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah oleh pembuat laporan keuangan.

Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis yang ketiga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianisanti (2017) membuktikan secara empiris bahwa kapasitas sumber daya manusai berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian philander (2018) menyatakan bahwasanya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan kekuangan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporam keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dari nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} ($12,664 > 2,73$) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan pemerintah agar selalu memperhatikan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia agar kualitas laporan keuangan semakin baik dan berkualitas dan pemerintah juga harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Penelitian ini hanya meninjau tentang kualitas laporan keuangan daerah dari aspek standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi dan kapasitas sumber daya manusia saja, untuk penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel lainnya yang mampu membuktikan praktik pembuatan laporan keuangan dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Artana, Sari, Arlia. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Tebing Tinggi.
- Artana. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Diani , Irma,Dian. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Di Pariaman)
- Evicahyani, S.I. dan Setiawina, N.D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

- Inapty. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan
- Juwita, Rukmi . 2010. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Kombong, Reni . 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Toraja
- Mardiana,Riski. 2017. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Banda Aceh
- Manimpurung, Rivaldy. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Manado
- Octarina. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang
- Pilander,Marini, Siska. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu.
- Rafid , Zuhudy,Rashwan. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kopetensi Sumberdaya Manusia Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Bone.
- Sari, Astuti, Purnama. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten (Studi Empiris Sekarisidenan Surakarta).
- Silviana. (2013). Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di Provinsi Jawa Barat).
- Susilawati. (2014). Standar Akuntansi Pemerintah Dan System Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Winidyaningrum, C., Dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten Kota Semarang).

- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating.
- Yudianta, I.A., Dan Erawati, N.M.A. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Yuliani Safrida, Nadirsyah Dan Usman. B. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh).
- Magfiroh, A. (2015). Pengaruh pengendalian intern dan sumber daya manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Tebo).